

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas PAD Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi

Riza

Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi
riza.zbc@gmail.com

Zuripal

Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi
ZuripalDarwis@gmail.com

Article's History:

Received 10 Agustus 2023; Received in revised form 21 Agustus 2023; Accepted 11 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Suggested Citation:

Riza., & Zuripal. (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas PAD Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5). 1961-1973.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1508>

Abstrak

Kemandirian daerah merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan Otonomi Daerah. Untuk itu perlu diketahui faktor apa yang mempengaruhi dan bagaimana pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan daerah, efektifitas PAD dan tax effort terhadap kemandirian daerah di Kota Bukittinggi baik secara parsial maupun secara simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 sampai dengan 2022 yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dan BPS Kota Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a)Ketergantungan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah (b)Efektifitas PAD tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian daerah (c)Tax effort memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah (d)Ketergantungan Daerah , Efektifitas PAD dan Tax effort secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Kata Kunci: tingkat ketergantungan daerah; efektifitas PAD; tax effort; kemandirian daerah

JEL Classification: L90, L91, L96

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Pemerintah merevisinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahun 2014 disahkan lagi Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia(Undang-Undang Nomor 23, 2014).

Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah(Mardiasmo, 2018). Kebijakan dalam otonomi daerah merupakan kebijakan negara yang

mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan mengoptimalkan mutu jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Nahmiati & UGM), 2008). Untuk memenuhi tujuan dari Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah perlu menggali potensi keuangan daerah, yaitu kekuatan yang ada di daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu, antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Mugiati, 2018).

Dalam mengelola tatanan fiskal di daerah pada umumnya Pemerintah Daerah di Indonesia kerap dihadapkan dengan fenomena lebih rendahnya kontribusi PAD dalam susunan APBD dan lebih didominasi oleh kontribusi penerimaan dana transfer Pemerintah Pusat dan sering disebut dengan dana perimbangan (Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti, 2021). Fenomena ketergantungan daerah terhadap pusat mempunyai implikasi fiskal yang signifikan, yaitu ketergantungan keuangan daerah kepada pusat yang sangat tinggi (Ketike, 2018). Peningkatan dan penguatan kemampuan kapasitas fiskal daerah didorong dengan kinerja Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif dalam melaksanakan desentralisasi fiskal (BPK RI, 2020). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara bersama-sama mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dari segi finansial (BPK RI, 2020). Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu parameter utama dalam mengukur kinerja pemerintah, dimana Pemerintah Daerah berupaya melakukan pembiayaan kegiatan daerah tanpa bergantung dari pihak luar termasuk Pemerintah Pusat (BPK RI, 2020).

Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021 dibandingkan 2020. Pada tahun 2020 lalu, realisasi PAD sebesar Rp84 milyar meningkat menjadi Rp 91,7 milyar lebih di tahun 2021. Pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 688.635.054.453,61 dari target sebesar Rp 684.347.061.146 atau sebesar 100,63%. Dimana salah satu komponen pendapatan daerah ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai sebesar Rp 91.786.288.185, dari target sebesar Rp 92.110.528.556 atau 99,65% (Kominfo Bukittinggi, 2022). Selain mengalami peningkatan penerimaan PAD, indikator ekonomi Bukittinggi juga mengalami peningkatan. Berdasarkan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka (PSBDA) Tahun 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat pada Februari 2022 lalu, Kota Bukittinggi menempati posisi sebagai daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi tercatat memiliki PDRB per kapita tahun 2022 sebesar Rp 83,45 juta, diikuti oleh Kota Padang di urutan kedua, sebesar Rp 79,38 juta (BPS, 2023). Sebagaimana diketahui, PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, mengindikasikan wilayah tersebut semakin makmur. Selain itu penilaian terhadap laporan keuangannya Kota Bukittinggi untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke sembilan kali berturut-turut (Kominfo Kota Bukittinggi, 2022).

Namun dibalik semua prestasi diatas ternyata Kota Bukittinggi masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana terlihat dari Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemko Bukittinggi

Tahun	Pendapatan	Belanja
2018	Rp 695.592.067.770,61	Rp 705.251.103.983,95
2019	Rp 734.106.596.896,05	Rp 716.528.264.978,33
2020	Rp 689.222.919.606,62	Rp 796.660.536.289,97
2021	Rp 688.635.054.453,61	Rp 650.051.328.563,46
2022	Rp 698.402.386.323,22	Rp 744.059.199.525,66

Sumber: LRA Kota Bukittinggi, 2022

Ketergantungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap sumbangan Pemerintah Pusat masih sangat besar ini dapat kita lihat dari besarnya porsi pendapatan transfer dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Fenomena yang timbul dalam dana transfer terletak pada perbedaan pemahaman fungsinya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat memberikan dana transfer untuk pemerataan keuangan antar daerah. Sedangkan, Pemerintah Daerah merespon dana transfer sebagai pemberian dana untuk mencukupi kebutuhan daerahnya. Dalam perbedaan

ini yang menyebabkan adanya respon belanja yang lebih banyak terhadap dana transfer dari pada Pendapatan Asli Daerahnya itu sendiri. Hal ini sering disebut dengan flypaper effect (Saleh, 2020).

Selain flypaper effect perlu juga mempertimbangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan daerah serta penetapan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai sumber penghasilan bagi daerah (Undang-Undang Nomor 23, 2014), sehingga setiap potensi yang dapat menghasilkan bagi daerah harus dapat di gali semaksimal mungkin dan di kelola dengan sebaik-baiknya. Tentunya tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menilai fenomena ini perlu dilihat tingkat efektifitas PAD dan upaya pajaknya (tax effort).

Berdasarkan fenomena di atas, perlu dilakukan penelitian bagaimana kondisi Pendapatan Asli Daerah terutama perpajakan di Kota Bukittinggi yang dapat kita lihat dari efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar upaya pemerintah Kota Bukittinggi untuk menggali dan meningkatkan potensi pajaknya (tax effort) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu sejauh mana rasio ketergantungan daerah (fly paper effect), efektifitas PAD dan tax effort mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Manajemen Publik Baru (*New Public Management*)

Teori ini berdasarkan keinginan untuk membebaskan menejer publik dalam hal ini kepala daerah dari aturan-aturan administrasi dan birokrasi yang menghalanginya sehingga para kepala daerah tersebut dapat leluasa mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan kompetensi yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik. dengan mengadopsi pendekatan manajemen modern yang biasanya dipakai oleh organisasi swasta kedalam organisasi publik. hal ini menggeser konsep organisasi publik yang tradisional, kaku, birokratis dan hierarkis menjadi organisasi publik yang lebih fleksibel dan mengikuti pasar (hood, 1990).

Perubahan ini merupakan suatu bentuk reformasi birokrasi dan desentralisasi kekuasaan untuk mencapai demokrasi. peran pemerintah dan masyarakat juga berubah sehingga membentuk pola hubungan yang baru yang lebih mirip dengan hubungan dalam organisasi swasta (hughes, 1998). Manajemen publik baru berasumsi bahwa masyarakat dianggap sebagai konsumen yang memiliki akal, keinginan dan pilihan yang rasional yang menuntut pemerintah dapat memberikan pencapaian tujuan sesuai dengan target yang ditetapkan. target tersebut dapat diukur sebagaimana sektor swasta (hood, 1995).

Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Salah satu teori manajemen swasta yang diadopsi oleh manajemen sektor publik adalah stewardship theory. dalam stewardship theory sebagai bagian dari agency theory (donaldson, lex, dan davis james, 1991) digambarkan para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan pribadi/individu tetapi lebih fokus kepada pencapaian tujuan utama dari organisasi demi kepentingan organisasi. teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. teori stewardship lebih banyak diterapkan pada penelitian dibidang akuntansi organisasi sektor publik seperti pemerintahan dimana akuntansi sektor publik ini dipersiapkan untuk pemenuhan kebutuhan informasi antara stewards dengan principals.

akuntansi merupakan penggerak (driver) pelaksanaan transaksi organisasi sektor publik yang semakin kompleks yang diikuti oleh muncul dan berkembangnya spesialisasi dalam akuntansi. seiring dengan bertambahnya tuntutan terhadap akuntabilitas kinerja pada organisasi sektor publik membuat principal menjadi semakin sulit melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan secara mandiri. ini membuat semakin jelasnya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan. karena berbagai keterbatasan tersebut maka pemilik sumberdaya (capital suppliers/principals) memberikan kepercayaan (trust = amanah) untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya tersebut kepada pengelola (steward = manajemen) yang lebih memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mengelolanya. steward dan principals terikat kontrak yang didasarkan kepada kepercayaan (amanah = trust), masing-masingnya bertindak kolektif menyesuaikan tujuan organisasi yang akan dicapai, oleh karena itu untuk organisasi sektor publik model yang sesuai adalah menggunakan stewardship theory.

Kemandirian Daerah

kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan yang mencakup pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah taat membayar pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber daya yang diperlukan oleh daerah. ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung serta kekayaan daerah yang dipisahkan. keuangan daerah yang dikelola langsung seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah/apbd dan barang-barang inventaris milik daerah, sementara itu keuangan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti badan usaha milik daerah /bumd(halim, 2014). kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa berpotensi untuk dikelola oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengaruh Ketergantungan Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Ketergantungan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diprosikan dengan kemandirian keuangan daerah(Nurul Ikhwan, Naz'aina, 2019), Pengaruh negatif dikarenakan ketergantungan daerah secara keuangan kepada pusat akan menjadikan daerah tidak mandiri secara keuangan(Abdullah, 2020). Ketergantungan Daerah ini juga bisa memperkecil rasio kemandirian keuangan daerah(Fadhli et al., 2023).

Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah(Permatasari & Trisnangsih, 2022). Pengaruh positif efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa perolehan pendapatan daerah yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah(Anynda & Hermanto, 2020). Demikian juga dengan hasil penelitian(Tjahjono & Oktavianti, 2017) di DIY Efektifitas PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Namun menurut(Marnas, Afrizal, 2012) efektifitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. Hal ini terjadi karena target PAD yang akan direalisasikan jumlahnya sangat kecil sehingga secara mandiri tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya anggaran.

Pengaruh Tax effort terhadap Kemandirian Daerah

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tax effort berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah(Melanthon Rumapea, 2020), demikian pula dengan(Rahmayani, 2018)menunjukkan bahwa tax effort berpengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi dengan mengambil data pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada bulan Mei tahun 2023 sampai selesai. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 s.d. 2022 perbulan. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda karena variabel yang digunakan lebih dari satu maka Analisis Regresi Berganda lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Regresi Berganda berguna untuk meramalkan dan membuktikan ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan antara dua buah variable bebas (X) atau lebih dengan sebuah variable terikat (Y).

Tahapan Uji Analisis sebagai berikut:

A. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bisa dengan varian yang minimum (best linier unbiased estimator = blue), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan” (Ghozali, 2009).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat *tolerance value* atau dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS.

3. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi linier yang digunakan memiliki korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1).

4. Uji Heterokedastisitas

Untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lainnya dilakukan uji heterokedastisitas. Jika varian dari residual pengamatan satu dengan yang lainnya tetap disebut homokedastisitas jika terdapat perbedaan maka terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat pola yang dibentuk oleh titik-titik pada grafik scatterplot yang dibentuk oleh suatu persamaan regresi.

B. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan (kemandirian daerah) daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi formulasi persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y	=	Kemandirian daerah
a	=	Konstanta
b ₁ -b ₃	=	Koefisien regresi
X ₁	=	Tingkat Ketergantungan Daerah
X ₂	=	Efektifitas PAD
X ₃	=	Upaya Pajak (Tax effort)
e	=	variabel pengganggu

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu uji koefisien determinasi juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang dimiliki.

2. Uji Hipotesis

Hipotesis statistik merupakan pernyataan sementara tentang satu populasi atau lebih. Dalam statistika, pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting untuk mengambil keputusan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti dilakukan pengujian hipotesis. Jawaban dari pertanyaan tersebut dalam bentuk pernyataan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 26 dilakukanlah uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi linier yaitu :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing - masing variabel berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan jika angka signifikan (Sig) > $\alpha = 0,05$ maka data berdistribusi normal. Tetapi jika Angka signifikan (Sig) < $\alpha = 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal (Santoso, 2007): Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Uji Normalitas

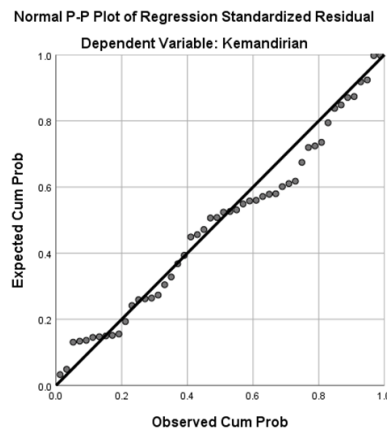
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	192.5190045
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.119
	Negative	-.083
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Pada tabel 2 diatas, terlihat bahwa diperoleh angka signifikan (Sig) sebesar 0,076 yang lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Hal ini juga dapat dilihat dari grafik histogram uji normalitas yang berbentuk lonceng sempurna sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal.



Gambar 3. Grafik Plot Uji Normalitas

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Dari gambar diatas terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil uji multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1944.082	1347.495		1.443	.156		
	Ketertarikan	-.089	.096	-.166	-.924	.360	.528	1.896
	Tax Effort	4.010	4.503	.249	.891	.378	.217	4.616
	LNEfektifitasPAD	33.869	102.089	.104	.332	.742	.174	5.738

a. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa keempat variabel independent tersebut memiliki nilai VIF di bawah batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10 dan nilai collinearity tolerance lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model.

3. Uji Autokorelasi

Dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson dengan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.467 ^a	.218	.167	208.489	1.557

a. Predictors: (Constant), LNEfektifitasPAD, Ketertarikan, Tax Effort

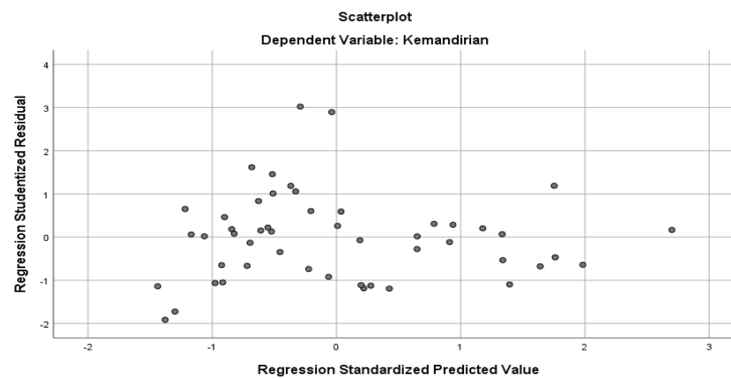
b. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Pada tabel 4 diatas, dimana nilai d atau nilai Durbin-Watson diperoleh angka 1,557. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson dengan angka signifikansi 5 % dimana nilai dL sebesar 1,4206 dan dU sebesar 1,6739 untuk penelitian dengan k = 3 variabel independen n = 50 sampel. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi karena nilai $dU < d < 4 - dU$ yaitu $1,4206 < 1,557 < 2,3261$.

4. Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heterokedastisitas dapat dilihat dari diagram Scatterplot berikut:



Gambar 4. Diagram Uji Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam model tidak terdapat heterokedastisitas karena pada gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa dalam model, variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama atau konstan. Sehingga asumsi tidak adanya heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas sudah terpenuhi untuk persamaan regresi.

B. Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Y	=	Kemandirian daerah
a	=	Konstanta
b1-b3	=	Koefisien regresi
X1	=	Tingkat Ketergantungan Daerah
X2	=	Tax Rasio
X3	=	Upaya Pajak (Tax effort)

Dengan bantuan SPSS diperoleh hasil:

Tabel 5. Hasil uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3303.817	852.690		.000
	Ketergantungan	-.212	.096	-.396	.032
	Efektifitas PAD	-.071	.033	-.870	.034
	Tax Effort	16.338	5.650	1.016	.006

a. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Dari hasil diatas maka di peroleh persamaan regresi linier bergandanya sebagai berikut :

$$Y = 3303,817 - 0,212 X_1 - 0,071 X_2 + 16,338 X_3$$

Persamaan regresi linier berganda ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 3303,817. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi Ketergantungan daerah (X1), efektifitas PAD (X2), dan tax effort (X3) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kemandirian daerah adalah 3303,817.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel ketergantungan daerah (X1) yaitu sebesar - 0,212. Hal ini artinya jika variabel ketergantungan daerah kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya variabel kemandirian daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,212%. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel Efektifitas PAD (X2) memiliki nilai negatif sebesar - 0,071. Hal ini menunjukkan jika Efektifitas PAD mengalami kenaikan 1%, maka kemandirian daerah akan penurunan sebesar 0,071% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel tax effort (X3) memiliki nilai positif sebesar 16,338. Hal ini menunjukkan jika Tax effort mengalami kenaikan 1%, maka kemandirian daerah akan naik sebesar 16,338 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

1. Analisis Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan Koefisien Determinasi penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.538 ^a	.290	.244	198.698

a. Predictors: (Constant), Tax Effort, Ketergantungan, Efektifitas PAD

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Berdasarkan hasil output SPSS tampak bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.290. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD dan tax effort sebesar 29 % secara simultan terhadap kemandirian daerah sedangkan sisanya (1-R²) sebesar 71% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t – test)

Sebelum melakukan uji t dengan SPSS terlebih dahulu kita hitung nilai t tabel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} T \text{ tabel} &= t (a/2: n-k-1) \\ &= t (0,05/2: 50- 3 - 1) \\ &= t(0,025 : 46) \end{aligned}$$

Lihat tabel t = 2,01290

Hasil uji t dengan SPSS dapat dilihat dari gambar berikut :

Tabel 7. Hasil uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3303.817	852.690		3.875	.000
	Ketergantungan	-.212	.096	-.396	-2.210	.032
	Efektifitas PAD	-.071	.033	-.870	-2.183	.034
	Tax Effort	16.338	5.650	1.016	2.891	.006

a. Dependent Variable: Kemandirian

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

Hal ini berarti bahwa :

- Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kemandirian Daerah.

Nilai sig 0,032 < 0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Nilai t hitung 2,210 > t tabel 2,0129 dengan nilai t negatif sehingga dapat disimpulkan ketergantungan daerah (X1) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah (Y).

- Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Kemandirian Daerah

Dengan Sig 0,034 < 0,05, nilai t hitung - 2,183 > dari t tabel 2,0129. Hal ini berarti maka H2 ditolak dan Ho diterima. Artinya efektifitas PAD (X2) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah (Y).

- Pengaruh tax effort terhadap kemandirian daerah

Dengan nilai Sig 0,006 < 0,05, maka H3 diterima dan Ho ditolak dan t hitung 2,891 > t tabel 2,0129. Maka disimpulkan bahwa variabel tax effort (X3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah.

b. Uji Simultan (f – test)

Untuk Uji simultan dengan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Silmultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	741196.032	3	247065.344	6.258	.001 ^b
	Residual	1816114.788	46	39480.756		
	Total	2557310.820	49			

a. Dependent Variable: Kemandirian

b. Predictors: (Constant), Tax Effort, Ketergantungan, Efektifitas PAD

Berdasarkan tabel output SPSS diatas diperoleh nilai Sig. Adalah sebesar 0,010. Karena nilai Sig 0,001 < 0,05. Sehingga hasil dari uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dengan kata lain ketergantungan daerah (X1), efektifitas PAD (X2) dan tax effort (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dengan nilai F hitung sebesar 6,258. Sedangkan F tabel dari penelitian dengan k = 3 (variabel independen) n = 58 (jumlah sampel) diperoleh :

$$\begin{aligned} F \text{ tabel} &= F (k : n - k) \\ &= F (3 : 50-3) \\ &= F (3 : 47) \\ &= 2.80 \end{aligned}$$

Sehingga F hitung 6,258 > F tabel 2,80 dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dengan kata lain ketergantungan daerah (X1), efektifitas PAD (X2) dan tax effort (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Pembahasan

Pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap kemandirian daerah.

Nilai sig 0,032 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. nilai t hitung dari variabel ketergantungan daerah (x1) adalah sebesar -2,210 yang lebih besar dari t tabel = 2,01290. sehingga disimpulkan bahwa variabel ketergantungan daerah (x1) memiliki kontribusi terhadap kemandirian daerah (y). nilai t negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah dari variabel ketergantungan daerah (x1) dengan kemandirian daerah (y). jadi dapat disimpulkan ketergantungan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian dari (abdullah, 2020) dan (nurul ikhwani, naz'aina, 2019) bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah yang diprosikan dengan kemandirian keuangan daerah. sementara (fadhli et al., 2023) menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah ini akan mengurangi rasio kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh efektivitas pad terhadap kemandirian daerah

Untuk efektifitas pad (x2) nilai sig juga lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,034 < 0,05, maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. namun jika kita lihat dari nilai t hitung variabel efektifitas pad (x2) mempunyai t hitung yakni -2,183 dengan t tabel=2,01290. jadi t hitung > t tabel dapat disimpulkan bahwa variabel efektifitas pad (x2) memiliki kontribusi terhadap kemandirian daerah (y). nilai t negatif menggambarkan bahwa variabel efektifitas pad (x2) mempunyai hubungan yang terbalik atau berlawanan arah dengan kemandirian daerah (y). maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis H_2 ditolak dan H_0 diterima. efektifitas pad tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah. hasil ini didukung oleh penelitian dari (marnas, afrizal, 2012) bahwa efektifitas pad berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. hal ini terjadi karena target pad yang akan direalisasikan jumlahnya sangat kecil sehingga secara mandiri tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya penganggaran.

Pengaruh tax effort terhadap kemandirian daerah

Untuk tax effort nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,006 < 0,05, maka H_3 diterima dan H_0 ditolak. variabel tax effort (x3) mempunyai t hitung yakni 2,891 dengan t tabel=2,01290. jadi t hitung > t tabel dapat disimpulkan bahwa variabel tax effort (x3) memiliki kontribusi terhadap kemandirian daerah (y). nilai t positif menunjukkan bahwa variabel tax effort (x3) mempunyai hubungan yang searah dengan kemandirian daerah (y). jadi dapat disimpulkan tax effort memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. hasil ini juga disimpulkan oleh (melanthon rumapea, 2020) tax effort berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. hal ini juga didukung oleh penelitian dari (rahmayani, 2018) bahwa tax effort berpengaruh signifikan terhadap kemandirian pembangunan daerah

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan terhadap Kinerja Keuangan Kota Bukittinggi maka dapat disimpulkan bahwa Ketergantungan daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. Semakin tinggi Ketergantungan Daerah maka Kemandirian Daerah akan semakin rendah. Kemudian Efektifitas PAD tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian daerah. Semakin Efektif PAD ternyata Kemandirian Daerah semakin berkurang. Selanjutnya Tax effort memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Terakhir Ketergantungan Daerah, Efektifitas PAD dan Tax effort secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

REFERENSI

- Abdullah, S. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4). <https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1216>
- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- BPK RI. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019.
- BPS. (2023). [Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Rupiah), 2020-2022. <https://sumbar.bps.go.id/indicator/52/169/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>
- Bukittinggi, K. K. (2022). REALISASI PAD NAIK DAN PDRB PER KAPITA TERTINGGI SE-SUMBAR, EKONOMI BUKITTINGGI MULAI PULIH. Pemko Bukittinggi. <https://www.bukittinggikota.go.id/berita/realisasi-pad-naik-dan-pdrb-per-kapita-tertinggi-se-sumbar-ekonomi-bukittinggi-mulai-pulih>
- Fadhli, F., Asnawi, A., & Jummaini, J. (2023). Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v7i2.8884>
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 23, (2014).
- Ketike, R. (2018). Analisis Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bidang Pendapatan Pada Kabupaten Gayo Lues. 1, 1–12.
- Kominfo Kota Bukittinggi. (2022). Bpk Berikan Opini Wtp Untuk Lkpd Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021. Pemko Bukittinggi. <http://bukittinggikota.go.id/berita/bpk-berikan-opini-wtp-untuk-lkpd-kota-bukittinggi-tahun-anggaran-2021>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Marnas, Afrizal, Y. (2012). Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Keserasian Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Lingkungan Provinsi Jambi). 81–89.
- Melanthon Rumapea, G. S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3.
- Mugiati, T. (2018). Pengaruh anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah.
- Nahmiati, E. P., & UGM). (2008). Analisis Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Bima). Tidak Dipublikasikan.
- Nurul Ikhwan, Naz'aina, R. (2019). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Flypaper. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-Mind)*, 4, S2–S3.
- Permatasari, D. A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Rahmayani, M. W. (2018). Analisis Tentang Kemandirian Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 5, 1–10.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan

- Pemerintah Daerah. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik.
- Santoso, S. (2007). Total Quality Management (TQM) dan Six Sigma. Elex Media Komputindo.
- Saraswati, N. P., & Nashirotn Nisa Nurharjanti. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 2, 51–64.
- Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2017). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY. Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha, 24(1), 25–34. <https://doi.org/10.32477/jkb.v24i1.215>